

**OPERATING METHODE OF CRIMINAL OFFENSE OF CORRUPTION
IN ROAD PROCUREMENT IN WEST SUMATERA PROVINCE AT THE
CASE NUMBER: 80 / PID. SUS / TPK / 2016 / PN.JKT.PST**

Wahyuni Syah Johan¹, Uning Pratimaratri¹, Eva Rita²

¹Study program of Legal Studies Graduate University of Bung Hatta

²Study Program of Civil Engineering Graduated University of Bung Hatta

Email : wahyunisyahjohans@gmail.com

ABSTRACT

Article 5 paragraph (1) letter a of Law Number 31 Year 1999 as amended by Law Number 20 Year 2001 in its formulation regulates bribery. In West Sumatra, five people were secured, allegedly involved in bribery in the planned construction of 12 road sections whose budget was from the 2016 APBN-P with a total bribe of Rp.500,000,000. Problems in the study: 1. What is the mechanism for budgeting for the Special Allocation Fund (DAK) in the 2016 APBN-P for road procurement in West Sumatra Province? 2. How is the application of elements of criminal acts on road procurement in West Sumatra Province in case number: 80/Pid.Sus/TPK/2016/PN-Jkt.Pst? This research was normative legal research. Data collection techniques were the study of documents with primary, secondary and tertiary legal material data sources. Data was analyzed qualitatively. Research result; 1. The DAK budgeting mechanism in the 2016 APBN-P was regulated in the Minister of Finance Regulation Number 139/PMK.07/2016, but the implementation of corruption still exists with the operating methode of giving bribes through intermediaries, with a source of bribe funds coming from several contractors, to disguise sources of funds, used family accounts from intermediaries. 2. Application of elements of corruption in cases number: 80/Pid.Sus/TPK/2016/PN-Jkt.Pst based on Article 5 paragraph (1) letter a of Law Number 31 Year 1999 as amended by Act Number 20 Year 2001 consisting of each person, give or promise something, to government employees or states organizers, with the intention that government employees or states organizers do something or do nothing in his position that is contrary to his obligation, has been fulfilled.

Keywords : operating methode, corruption, procurement, road

**MODUS OPERANDI TINDAK PIDANA KORUPSI PADA PENGADAAN
JALAN DI PROVINSI SUMATERA BARAT PADA PERKARA NOMOR :
80/PID. SUS/TPK/2016/PN.JKT.PST**

Wahyuni Syah Johan¹, Uning Pratimaratri¹, Eva Rita²

¹Program Studi Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Bung Hatta

²Program Studi Teknik Sipil Pascasarjana Universitas Bung Hatta

Email : wahyunisyahjohans@gmail.com

ABSTRAK

Pasal 5 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 dalam rumusannya mengatur tentang perbuatan suap. Di Sumatera Barat lima orang diamankan, diduga terlibat suap rencana pembangunan 12 ruas jalan yang anggarannya dari APBN-P 2016 dengan jumlah suap Rp.500.000.000,- . Permasalahan dalam penelitian: 1. Bagaimana mekanisme penganggaran Dana Alokasi Khusus (DAK) pada APBN-P tahun 2016 untuk pengadaan jalan di Provinsi Sumatera Barat? 2. Bagaimana penerapan unsur-unsur tindak pidana pada pengadaan jalan di Provinsi Sumatera Barat pada perkara nomor : 80/Pid.Sus/TPK/2016/PN-Jkt.Pst? Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif. Teknik pengumpulan data adalah studi dokumen dengan sumber data bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Data dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian; 1. Mekanisme penganggaran DAK pada APBN-P Tahun 2016 diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 139/PMK.07/2016, namun pelaksanaannya masih ada oknum melakukan korupsi dengan modus operandi pemberian suap dilakukan melalui perantara para pihak, dengan sumber dana suap berasal dari beberapa kontraktor, untuk menyamarkan sumber dana, menggunakan rekening keluarga dari perantara. 2. Unsur tindak pidana korupsi pada perkara nomor : 80/Pid.Sus/TPK/2016/PN-JKT.Pst berdasarkan Pasal 5 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 yang terdiri setiap orang, Memberikan atau menjanjikan sesuatu, Kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara, Dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya telah terpenuhi.

Kata Kunci : modus operandi, korupsi, pengadaan, jalan